

**EFEKTIVITAS CASH FOR WORK DI INDONESIA:
Studi Implementasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
Di Kabupaten Purworejo**



Oleh:
Adib
NIM : 17200010024

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelas Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik**

**YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adib
NIM : 17200010024
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purworejo, 5 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Adib

NIM : 17200010024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adib

NIM : 17200010024

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Purworejo, 5 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Adib

NIM : 17200010024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-192/Un.02/DPPs/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS CASH FOR WORK DI INDONESIA: Studi Implementasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Kabupaten Purworejo

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADIB, S.Hi
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010024
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

**Ro'fah, M.A., Ph.D.
SIGNED**

Valid ID: 5ee39ec52ee10



Penguji II

**Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
SIGNED**

Valid ID: 5ee08effa3ebb



Penguji III

**Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.
SIGNED**

Valid ID: 5ee1876e3a893



**Yogyakarta, 20 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana**

**Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
SIGNED**

Valid ID: 5ee70abab3c34

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**EFEKTIVITAS CASH FOR WORK DI INDONESIA:
Studi Implementasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
Di Kabupaten Purworejo**

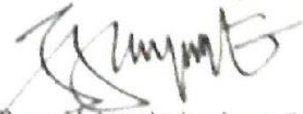
Yang ditulis oleh :

Nama : Adib
NIM : 17200010024
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A)

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 April 2020
Pembimbing


Dr. Pagar Halina Indra Jaya, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk seluruh umat manusia yang berjuang dalam rangka memperbaiki kebijakan pulik di Indonesia

Semoga kebijakan Indonesia ke depan semakin baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



Bikin hidup lebih hidup...

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga di masa pandemi wabah corona ini, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul: EFEKTIVITAS CASH FOR WORK DI INDONESIA: Studi Implementasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Kabupaten Purworejo yang sempat tertunda beberapa waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang selalu menjadi teladan bagi kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang cukup berkontribusi memberikan ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu; Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., selaku direktur Pascasarjana, Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., selaku kaprodi, Ahmad Norma Permata, Ph.D. selaku perintis IPKP, serta seluruh dosen baik dari pascasarjana, fakultas lain, dan dosen-dosen UGM yang telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat selama saya mengenyam kuliah di Pascasarjana ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S. Sos., M.Si., selaku pembimbing yang banyak memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis demi penyempurnaan tesis ini. Kepedulian, kesabaran, serta keterlibatan aktif beliau selama mendampingi pembuatan tugas akhir sangat saya apresiasi, meskipun di beberapa bulan terakhir harus

berkomunikasi secara daring demi menerapkan aturan *social distancing* yang harus dijaga bersama.

Terima kasih kepada teman-teman IPKP yang selalu memberi *support* dalam setiap diskusi. Saya cukup beruntung dengan peran serta kakak angkatan yang sangat *care* dan mensupport kami setiap waktu. Terlebih bagi teman-teman angkatan 2017 yang menjadi keluarga kecil dan menemani hari-hari diskusi selama perkuliahan, semoga kita akan selalu berkumpul dan berbagi ilmu baik secara langsung maupun di dunia maya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan ISD Institute dan FORKAPP (Forum Komunikasi Kebijakan Publik) yang selalu menemani diskusi rutin mengenai perkembangan kebijakan yang selalu dibahas dari berbagai sudut pandang.

Terima kasih untuk Wido dan segenap teman-teman MKP Fisipol UGM, yang selalu mengajak *sharing* dan diskusi baik di kafe maupun warung kopi, sehingga menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai berbagai kebijakan di Indonesia. Kalian sangat membantu dalam penulisan tesis ini. Terima kasih untuk para informan yang telah bersedia meluangkan waktu, khususnya kepada Mas Fauzan sebagai tenaga ahli DD di Kabupaten Purworejo yang bersedia meluangkan waktu kapanpun untuk *sharing* serta berbagi informasi.

Terima kasih juga kepada teman-teman Mapalaska dan segenap kawan yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah menemaniku selama menempuh pendidikan di pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Tidak lupa,

ucapan terima kasih kepada kawan-kawan perjuangan ex-kontrakan Karangwuni E3A yang menemani kumpul berkala dengan berbagai cerita.

Penulis menyadari atas keterbatasan tesis ini dan masih banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tesis ini serta masukan untuk penelitian yang lebih lanjut. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca,...

Purworejo, Mei 2020



Adib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemerintah mewajibkan 30% alokasi dana desa untuk padat karya tunai (*cash for work*). Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan warga miskin sebagai target sasaran utama yang terdiri dari penganggur, setengah menganggur, warga miskin, dan *stunting*. Namun apakah implementasi program tersebut berjalan efektif sesuai dengan tujuan awal? Penelitian ini membahas implementasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk melihat bagaimana implementasi program tersebut.

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, penulis melakukan kajian di Kabupaten Purworejo dengan mengambil lokasi di 3 desa yang mewakili Kabupaten Purworejo berdasarkan wilayah pesisir, dataran rendah, serta pegunungan. Terdapat 21 informan yang diwawancarai secara *purposive sampling* dari level kabupaten hingga desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *cash for work* cukup berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, namun tidak menysasar target secara tepat seperti harapan awal. Memahami *cash for work* melalui pendekatan hibrida menggambarkan adanya disorientasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Inkonsistensi regulasi di berbagai lini berimbas pada deviasi implementasi di level *grass root*. Selama 2 tahun berjalan, implementasi *cash for work* di Kabupaten Purworejo belum berjalan efektif dan prinsip pelaksanaan kegiatan tidak dipraktikkan secara maksimal. Beberapa indikasinya antara lain; minimnya partisipasi perempuan, transparansi dan inklusifitas program yang rendah, swadaya dan swakelola yang belum maksimal, bahkan data warga *stunting* belum tersedia. Tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang terdiri dari 4 sasaran utama mengalami penyimpangan, karena wilayah pembangunan menjadi fokus utama dalam pemilihan pekerja.

Kata Kunci: *Padat Karya Tunai, Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa, Cash For Work*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II DANA DESA UNTUK MENDORONG PADAT KARYA TUNAI Error! Bookmark not defined.	
A. Esensi Undang-Undang Desa	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Dana Desa	Error! Bookmark not defined.
C. Formulasi Dana Desa.....	Error! Bookmark not defined.
D. Sejarah Padat Karya Tunai.....	Error! Bookmark not defined.
E. Prosedur Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BAB III PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) DI KABUPATEN PURWOREJO.....	Error! Bookmark not defined.
A. Keadaan Umum Masyarakat Kabupaten Purworejo	Error! Bookmark not defined.
defined.	
B. Profil Desa	Error! Bookmark not defined.
C. Kebijakan Dana Dana Desa di Kabupaten Purworejo	Error! Bookmark not defined.
defined.	

BAB IV IMPLEMENTASI PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) DI KABUPATEN PURWOREJO.....Error! Bookmark not defined.

A. Kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Kabupaten Purworejo **Error! Bookmark not defined.**

B. Efektivitas Implementasi Padat Karya Tunai Desa di Kabupaten Purworejo **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....28

A. Kesimpulan28

B. Saran29

DAFTAR PUSTAKA30

LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Informan.....	21
Tabel 3.1	Batas Wilayah Kabupaten Purworejo	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2	Keadaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2018	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.3	Profil IDM Tahun 2019 dan Keadaan Wilayah Desa Sampel	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.4	Batas Wilayah Desa Kedungkamal	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.5	Batas Wilayah Desa Keburusan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.6	Batas Wilayah Desa Benowo	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1	Prosentase Pekerja Padat Karya Tunai Desa (PKTD).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2	Prosentase Upah Pekerja Berdasarkan Anggaran Pembangunan dari Dana Desa	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3	Perbandingan Upah Pekerja PKT di Tiga Desa	Error! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Para Penggagas Teori Implementasi Kebijakan 15
- Gambar 2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Desa....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.2 Alokasi dan Penyerapan Dana Desa .**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.3 Prosentasi Alokasi Dana Desa Dalam 5 Tahun**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.4 Prosentase Alokasi Formula Dana Desa**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.5 Perbandingan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014 dan 2018
.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.6 Alur Program Padat Karya Tunai (*Cash For Work*)..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Purworejo dan Persebaran Lokasi Penelitian . **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 2 Anggaran dan Penyerapan Dana Desa Kabupaten Purworejo.. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Desa**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.2 Prosentase Jenis Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2018**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	: Basis Data Terpadu
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPPKAD	: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DD	: Dana Desa
Dinpermades	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ekobang	: Ekonomi dan Pembangunan
FAO	: Food and Agriculture Organization
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
HOK	: Hari Orang Kerja
IDA	: International Development Association
IDM	: Indeks Desa Membangun
IDT	: Inpres Desa Tertinggal
IKE	: Indeks Ketahanan Ekonomi
IKG	: Indeks Kesulitan Geografis
IKL	: Indeks Ketahanan Lingkungan
IKS	: Indeks Ketahanan Sosial
IPD	: Indeks Pembangunan Desa
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
ISI	: Industrialisasi Substitusi Impor
JLS	: Jalur Lintas Selatan
JPS	: Jaring Pengaman Sosial
Kadus	: Kepala Dusun
Kasi	: Kepala Seksi
Kaur	: Kepala Urusan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	:Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KK	: Kepala Keluarga
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Mdpl	: Meter Dari Permukaan Laut
Musrembangdes	: Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa

NGO	: Non Government Organization
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Om-span	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Desa
PD	: Pendamping Desa
Perbup	: Peraturan Bupati
Perdes	: Peraturan Desa
Perda	: Peraturan Daerah
Permendesa	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PKT	: Padat Karya Tunai
PLD	: Pendamping Lokal Desa
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan masyarakat
Podes	: Potensi Desa
Posbindu	: Pos Binaan Terpadu
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
PPKD	: Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
Prukades	: Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
PTKD	: Pelaksana Teknis Keuangan Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RAPBDes	: Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa
RKD	: Rekening Kas Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDG's	: Sustainable Development Goals
Sekda	: Sekretaris Daerah
Sekdes	: Sekertaris Desa
Sipede	: Sistem Informasi Pembangunan Desa
SK	: Surat Keterangan
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SSH	: Standar Satuan Harga
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TAPM	: Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
TPK	: Tim Pengelola Kegiatan
TTK	: Tim Teknis Kegiatan
UMR	: Upah Minimum Regional

UNDP : United Nations Development Program
WHO : World Health Organization



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 merupakan sebuah terobosan baru pemerintah untuk mengembangkan wilayah pedesaan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara otonom dengan segala potensi yang dimiliki. Hadirnya UU tersebut menegaskan kebijakan yang selama ini bersifat *top down*, dimana desa hanya sekedar menjadi objek pembangunan semata, namun kini ditempatkan sebagai subjek pembangunan melalui berbagai program pembangunan yang diamanahkan agar semakin mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan dapat memaksimalkan perputaran arus perekonomian, sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat.

Pemerintah mengeluarkan berbagai program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, salah satunya melalui program padat karya tunai (*cash for work*) yang mulai diimplementasikan pada awal tahun 2018 agar dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Meskipun didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga, Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) mempunyai wewenang pengelolaan yang paling besar melalui anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD). Untuk mengakomodir kebijakan tersebut, setiap desa diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 30% Dana Desa untuk program padat karya tunai. Belakangan, program tersebut terkenal dengan sebutan padat karya tunai desa (PKTD), sebuah program

pemberdayaan masyarakat miskin dan marginal yang bersifat produktif untuk menambah pendapatan masyarakat desa.

Jika kita cermati, dalam lima tahun terakhir alokasi DD telah berkontribusi pesat dalam membangun infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa sepanjang 231.709 km, 10.480 unit pasar desa, 4.859 embung desa, serta berbagai infrastruktur lainnya.¹ Bahkan dalam dua tahun terakhir pembangunan infrastruktur tersebut ikut disumbang dari program PKTD yang menjadi bagian dari dana desa. Pada awal tahun pelaksanaan, pemerintah menganggarkan sekitar 18 triliun atau 30 persen dari anggaran dana desa untuk kegiatan PKTD.² Terakhir, pemerintah mengalokasikan 8,6 triliun dari alokasi dana desa tahap 1 hanya untuk membayar upah pekerja yang berpotensi menyerap sekitar 7,9 juta pekerja di pedesaan pada tahun 2020.

Dengan anggaran yang besar, PKTD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di pedesaan yang terdiri dari 4 sasaran utama penerima program. Kriteria tersebut meliputi; pengangguran, setengah menganggur, warga miskin, dan *stunting* yang diutamakan untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Disamping itu, program ini juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat rentan dan marginal melalui kerangka prinsip yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program di lapangan. Namun patut digali lebih jauh, apakah program dengan anggaran yang besar tersebut sudah berjalan secara efektif.

¹ *Penyaluran Dana Desa Tahun 2015 - 2019*. <https://sipede.ppmd.kemendes.go.id/>. Diakses tanggal 1 Februari 2020.

² *Warta Pengawasan, Pengawasan Agar Tepat Sasaran*, Vol XXV No.1 Tahun 2018.

Mengacu pada temuan penelitian sebelumnya, meskipun termasuk dalam kategori kebijakan afirmatif konsep *cash for work* dari dana desa belum sepenuhnya mampu mengakomodir pelibatan masyarakat miskin dan rentan, dan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan masih minim. Bahkan di dalam penyalurannya, program ini tidak efektif dan efisien.³ Namun apakah hal yang sama juga terjadi di wilayah yang lain?.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu dilakukan kajian secara lebih lanjut terkait program *cash for work* ini, yaitu mengapa konsep *cash for work* belum dapat memberdayakan masyarakat miskin secara efektif sesuai konsep awal?. Untuk menjawab masalah tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai implementasi program PKTD di Kabupaten Purworejo. Sebagai kabupaten dengan karakteristik yang beragam dengan jumlah desa terbanyak di Jawa, implementasi program PKTD di Kabupaten Purworejo dapat menjadi salah satu gambaran pelaksanaan kegiatan PKTD di Indonesia. Tesis ini dikaji melalui pendekatan *hibrida*⁴ dengan melihat implementasi program PKTD di Kabupaten Purworejo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengapa konsep *cash for work* belum dapat memberdayakan masyarakat miskin

³ Tiara Rama Dian, Deni Herdiana, Smeru Research.

⁴ Pendekatan Hibida merupakan sebuah pendekatan untuk melihat implementasi kebijakan melalui dua sisi. Dari sisi *top-down*, melihat bagaimana kebijakan PKTD dirancang secara terstruktur di tingkat pusat, dan dari sisi *bottom-up* untuk melihat partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam penentuan kegiatan pembangunan di pedesaan.

secara efektif sesuai dengan konsep awal. Sebagai turunan dari pertanyaan ini, maka rumusan penelitian pendukungnya adalah:

1. Bagaimana implementasi PKTD di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan prinsip PKTD di Kabupaten Purworejo?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas implementasi PKTD di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

C.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai di dalam tesis ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi PKTD di Kabupaten Purworejo.
- b. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan prinsip PKTD di Kabupaten Purworejo.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi PKTD di Kabupaten Purworejo

C.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Secara akademis sebagai sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman kebijakan publik terkait proses implementasi program PKTD. Selain itu, tesis ini bisa digunakan sebagai studi awal bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam lokus penelitian demi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

- b. Secara praktis untuk menggambarkan implementasi *cash for work* dan dampaknya dalam rangka mengatasi kemiskinan di Indonesia, serta sebagai masukan bagi internal pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan padat karya tunai.

D. Kajian Pustaka

Konsep padat karya sudah banyak dijalankan di beberapa negara di dunia, khususnya negara kategori miskin dan berkembang melalui kolaborasi antara pemerintah dengan NGO (*Non Government Organization*) baik dari dalam negeri maupun NGO internasional. Skema *cash for work* diimplementasikan dalam jangka pendek (*short term*) sebagai sebuah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca peristiwa darurat seperti bencana atau konflik yang terjadi di negaranya.

Program padat karya tunai (*cash for work*) di Indonesia setiap periode mempunyai kemiripan dengan program yang sama pada periode-periode sebelumnya. Beberapa diantaranya seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di era orde baru, Jaring Pengaman Sosial (*sosial safety net*) pada era reformasi, atau padat karya di lingkup PNPM (Program Nasional Pemberdayaan masyarakat) pada era paska reformasi. Program tersebut umumnya dikeluarkan pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan akibat dampak dari suatu peristiwa atau kejadian yang cukup mengguncang perekonomian Indonesia.

Melihat keberhasilan program padat karya di beberapa era sebelumnya, konsep ini kembali dijalankan pada pemerintahan Presiden Jokowi. Program ini

bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat kelas bawah melalui pemanfaatan alokasi DD yang dilakukan secara swakelola dan meminimalisir pelibatan pihak ketiga. Dengan kemiripan program, skema PKTD (*cash for work*) yang diinisiasi di tahun 2018 ini sedikit berbeda dengan program padat karya yang telah ada di era pemerintahan sebelumnya dengan berbagai regulasi yang menaunginya.

Konsep mengenai padat karya di Indonesia sudah pernah dibahas oleh beberapa tokoh seperti Dr. Ir. Sjafriz Mangkuprawira selaku dekan Fakultas Pertanian IPB di tahun 1998 silam.⁵ Konsep ini dicanangkan ketika terjadi krisis moneter kala itu, sebagai salah satu solusi peralihan dari kebijakan yang berfokus pada perusahaan ke program padat karya yang berpotensi menghidupi lebih dari 4,4 juta penduduk Indonesia pasca krisis. Menurutnya, ada beberapa hal pokok yang perlu dicermati agar program dapat diaplikasikan secara maksimal, seperti; kesesuaian program, prioritas peserta penerima manfaat, pemerataan, pengawasan, serta pengendalian program berdasarkan kewilayahan.

Pasca bencana Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, Mercy Corps, sebuah NGO (*Non Government Organization*) Internasional turut membantu pemulihan perekonomian masyarakat setempat melalui program padat karya tunai. Program yang mempunyai kemiripan dengan program padat karya di beberapa negara di dunia ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca tsunami, sebagai sarana untuk memfasilitasi

⁵ Sjafriz Mangkuprawira, "Mengapa Program Padat Karya Diperlukan," *Majalah Agrimedia.*, Volume 4 No.1 (Februari 1998), 41-44.

pemulihan ekonomi yang berkelanjutan agar masyarakat bisa mandiri secara perlahan. Namun berdampak pada ketergantungan masyarakat pasca berakhirnya program.⁶

Namun hingga saat ini belum begitu banyak penelitian yang membahas mengenai padat karya tunai di yang berasal dari Dana Desa. Hingga penelitian ini dibuat, baru terdapat tiga tulisan baik jurnal maupun *paper work* yang membahas hal ini secara singkat. *Pertama*, penelitian Tiara Rama Dian yang membahas pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tunai pada tahun 2018.⁷ *Kedua*, *paper work* yang diterbitkan oleh SMERU Research mengenai catatan kebijakan padat karya tunai.⁸ *Ketiga*, tulisan Deni Herdiana membahas implementasi padat karya tunai dalam menurunkan penduduk miskin di pedesaan Provinsi Lampung dan Riau.⁹

Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa program padat karya tunai di Era Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Meskipun dapat meningkatkan pendapatan warga melalui pemberdayaan masyarakat, masih terdapat beberapa kelemahan di sana-sini seperti; minimnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian upah pekerja, adanya *unprofessional skill*

⁶ Shannon Doocy, dkk, "Implementing Cash For Work Programmes in Post-Tsunami Aceh: Experiences and Lessons Learned," *Jurnal Disaster.*, Vol. 30 Issue 3 Tahun 2006. Hal. 273-379.

⁷ Tiara Rama Dian, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai: Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedawung Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Publika.*, Vol.7 No.4 Tahun 2019.

⁸ Sumber: Catatan kebijakan Smeru. Seri UU Desa. NO.5/Okt/2018. "Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa". <http://www.smeru.or.id/id/content/memperbaiki-kebijakan-padat-karya-tunai-di-desa> diakses tanggal 1 Agustus 2019.

⁹ Deni Herdiyana, "Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan provinsi Lampung dan Riau" *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi.*, Vol. 16 No.2 Tahun 2019.

yang mengakibatkan kemoloran pekerjaan, ketentuan upah minimal yang berbeda, hingga minimnya alokasi upah untuk pekerja.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang ide dan dimensi padat karya tunai secara ringkas, penelitian ini akan membahas implementasi *cash for work* di Era Presiden Jokowi yang cukup familiar dikenal dengan istilah padat karya tunai desa (PKTD) secara lebih komprehensif. Di dalam penelitian ini akan dijelaskan secara lebih mendetail dari sejarah padat karya, kebijakan dan formulasi dana desa, hingga implementasi padat karya tunai di beberapa desa di Kabupaten Purworejo.

E. Kerangka Teoritis

Pemerintah membuat berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi kemiskinan di Indonesia melalui intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi penanggulangan kemiskinan secara langsung dilakukan agar masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap kesempatan kerja melalui kebijakan afirmatif yang menysasar target secara spesifik. Kebijakan ini berkaitan dengan nilai keadilan, agar kelompok/ golongan tertentu memperoleh kesempatan yang setara, sehingga tercapai suatu kesetaraan sosial di masyarakat.¹⁰

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut melalui serangkaian proses perumusan agar dapat menysasar target secara tepat. Proses kebijakan publik adalah

¹⁰ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 17.

serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas kebijakan ditentukan oleh proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai tahapan dan variabel. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila sasaran kebijakan dapat tercapai dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹ Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan dapat tercapai.¹² Dalam hal ini, efektivitas dimaknai sebagai sebuah ukuran untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam bukunya, Tachjan mencuplik tulisan Mustopadidjaja yang membagi siklus kebijakan menjadi tiga tahapan pokok, yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, serta pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.¹³ Di sisi lain, William N. Dunn membagi tahapan tersebut menjadi tujuh bagian yang meliputi; (1) penyusunan agenda (*agenda setting*), (2) formulasi kebijakan (*policy formulation*), (3) adopsi kebijakan (*policy adaption*), (4) implementasi kebijakan (*policy implementation*), (5) penilaian kebijakan (*policy evaluation*), (6) suksesi kebijakan (*policy succession*), dan (7) terminasi kebijakan (*policy termination*).¹⁴

¹¹ Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 16.

¹² Sopha Julia, *Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Pesanggrahan Kotamadia Jakarta Selatan* (Jakarta: Fisip UI, 2010), 24.

¹³ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006), 21.

¹⁴ William N. Dunn, *Public Policy Analysis An Integrated Approach*, Sixth Edition (New York: Routledge, 2018), 45.

Tulisan ini akan membahas lebih detail salah satu dari tahapan tersebut, yaitu implementasi kebijakan publik yang merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana kapabilitas eksekutif sangat diperlukan untuk mengorganisir secara efektif dan efisien baik sumber daya, unit-unit dan teknik untuk mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat dengan memberikan petunjuk yang jelas agar sebuah program dapat terealisasi dengan baik.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Riant Nugroho, rencana adalah 20 persen keberhasilan dan implementasi adalah 60 persen dari keberhasilan, sedangkan sisanya adalah bagaimana kita dapat mengendalikan implementasi tersebut. Implementasi merupakan hal yang paling berat karena belum tentu sama antara di lapangan dengan konsep yang dibuat, sehingga konsistensi implementasi sangatlah dibutuhkan.¹⁵

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah /swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah

¹⁵ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 736.

digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁶ Senada dengan Agustino, Hayat mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁷ Dalam pelaksanaannya diperlukan perangkat yang jelas agar fungsi implementasi berjalan secara efektif sehingga tujuan yang diharapkan benar-benar terwujud.

Namun tidak semua implementasi kebijakan sesuai dengan yang dicita-citakan. Salah satu tokoh kebijakan publik, yaitu Salahudin Kusumanegara memandang bahwa implementasi merupakan suatu proses yang bersifat administratif dan mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi, serta dampak dari suatu kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan belum tentu dapat mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁸

Dalam memahami implementasi kebijakan publik, terdapat tiga pendekatan yang umum digunakan untuk melihat bagaimana suatu kebijakan dapat terdistribusi. *Pertama* adalah model atas-bawah (*top-down*), yang menekankan pada kemampuan pembuat keputusan untuk menghasilkan tujuan kebijakan yang tegas dan pada pengendalian tahap implementasi. *Kedua* model bawah-atas (*bottom-up*), yang melihat birokrat lokal sebagai aktor utama dalam penyampaian kebijakan dan memahami implementasi sebagai proses negosiasi dalam jaringan

¹⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 195.

¹⁷ Hayat(ed), *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 85.

¹⁸ Salahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 97.

pelaksana. Ketiga model pendekatan hibrida, yang menggabungkan kedua unsur pendekatan sebelumnya dalam menganalisis keterlibatan para aktor implementor.¹⁹

Pendekatan hibrida merupakan pendekatan kombinasi (*hybrid approach*) dalam implementasi yang memadukan variabel utama dari kedua pendekatan sebelumnya dalam kerangka tunggal. *Hybrid approach* mencoba untuk mengatasi kelemahan konseptual dari pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang selama ini terpolarisasi dan lebih fokus pada argumen empiris tentang konseptualisasi yang tepat mengenai proses implementasi. Dalam pendekatan ini perlu mempertimbangkan aspek swadaya atau struktur pelaksana dan kelompok target kebijakan.²⁰

Menurut Sabatier, implementasi tidak dapat dianalisa tanpa melihat proses perumusan kebijakan sebagai suatu hal yang tak terpisahkan. Pendekatan hibrida muncul dalam kerangka advokasi kebijakan yang sama dengan pendekatan bawah-atas ketika analisis dimulai dari masalah kebijakan dan berlanjut dengan rekonstruksi strategi para aktor dalam rangka memecahkan masalah. Sabatier menekankan pentingnya kondisi sosial-ekonomi eksternal yang berdampak terhadap pembuatan kebijakan. Perpaduan arah dalam pembuatan kebijakan ini membawa implikasi dalam proses implementasi kebijakan, sehingga dapat

¹⁹ Helga Pulzl dan Oliver Treib, "Implementasi Kebijakan Publik", dalam: *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode*, Frank Fischer, dkk. Terj. Imam Baihaqi (Bandung: Nusa Media, 2014), 129.

²⁰ *Ibid.*, 138.

mengurangi kelemahan dari dua pendekatan sebelumnya dan memungkinkan level yang berbeda bisa berinteraksi secara reguler.²¹

Goggin, Bowman, Lester, dan O'Toole mengemukakan diri sebagai generasi ketiga di dalam penelitian implementasi yang mencoba menjembatani kesenjangan antara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Mereka menerima perspektif kebijakan yang ditetapkan oleh pusat untuk dilaksanakan oleh aktor di tingkat bawah. Namun proses implementasi kebijakan harus dijalankan oleh para aktor politik yang mandiri dan melalui proses negosiasi yang ketat antara pelaksana dengan pemerintah pusat. Seiring dengan itu, Scharpf termasuk salah satu penulis yang ikut mencoba mendamaikan kedua pendekatan. Dia berpendapat bahwa tujuan dari sebuah kebijakan ada di tingkat pusat, namun tindakan di lapangan yang tergantung pada interaksi para aktor yang berkepentingan.²²

Helga Puzl dan Oliver Treib, dalam Fischer mengemukakan bahwa teori-teori hibrida dalam implementasi kebijakan mendapat kontribusi dari beberapa pakar utama, antara lain; Elmore, Majone dan Wildavsky, Scharpf, Mayntz, Windhoff-Heritier, Ripley dan Franklin, Sabatier, Goggin, dan Winter. Sebagai reaksi terhadap perdebatan antara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, para peneliti seperti Elmore, Sabatier, dan Goggin berusaha untuk mensintesis kedua pendekatan tersebut, dengan memasukkan beberapa kelebihan masing-masing ke dalam model implementasi kebijakan mereka.²³

²¹ Paul. A. Sabatier, "Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis, *Journal of Public Policy*, Vol. 6 Issue.1, (1986), 21-48.

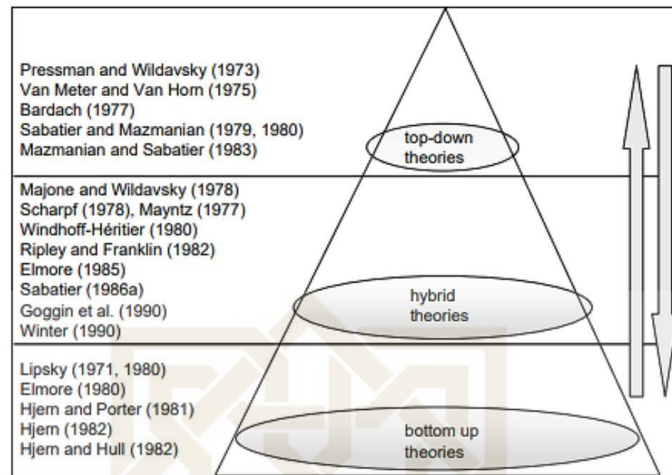
²² Helga Puzl dan Oliver Treib, "Implementasi Kebijakan Publik", 137.

²³ *Ibid.*, 136-139.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 1.1 Para Penggagas Teori Implementasi Kebijakan



Sumber: Frank Fischer: *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode*

Menurut Quade, terdapat empat variabel yang perlu dicermati dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, antara lain; (1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; (2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya; (3) Organisasi yang melaksanakan, biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan; dan (4) Faktor lingkungan, yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.²⁴

Dalam tahapan implementasi perlu juga untuk diperhatikan adanya unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yang meliputi; program itu sendiri, pelaksanaan

²⁴ Edward Schaumberg Quade, *Analysis For Public Decisions*, (New York: Elsevier Science, 1984), 310.

program dan kelompok sasaran program.²⁵ Sepadan dengan Korten, Tachjan juga mempertimbangkan tiga unsur yang perlu diperhatikan di dalam proses implementasi, yaitu: (1) pelaksana kebijakan (implementor), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, dan (3) target group.²⁶

Pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang, sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi mempengaruhi baik dalam pembuatan ataupun dalam pelaksanaan dan pengawasan atas perkembangan pelaksanaannya. Pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Smith menyebutnya dengan istilah “implementing organization”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.²⁷

Setiap kebijakan pemerintah harus diimplementasikan secara transparan dan akuntabel demi terwujudnya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan *society*.²⁸ Sesuai dengan karakteristik *good governance* yakni akuntabilitas, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor dan masyarakat (*civil society*) harus bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Artinya *governance* atau pemerintah, swasta

²⁵ David C. Korten (ed), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), 19.

²⁶ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 26.

²⁷ *Ibid.*, 27.

²⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 82.

dan masyarakat harus duduk bersama dalam mengawal implementasi kebijakan publik.

Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum berupa tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional agar dapat diimplementasikan dengan baik. Program merupakan rincian dari rencana secara komprehensif yang menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar serta biaya yang dibutuhkan untuk operasionalisasi kegiatan.

Menurut Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni (1) isi kebijakan (*content of policy*) yang meliputi; jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dihasilkan serta (2) lingkungan implementasi (*contex of implementation*) yang meliputi; kekuasaan, kepentingan, strategi aktor, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, kemudian implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.²⁹ Sedangkan Edwards III merumuskan empat faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni; komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, dan tata aliran kerja birokrasi.³⁰

²⁹ M.S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, (Princeton: Princeton University Press, 2017), 11.

³⁰ Edwards III, *Public Policy Implementing*, (London: Jay Press Inc, 1984), 9-10.

Ripley dan Franklin mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dari tiga aspek, yaitu: tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta adanya dampak/ manfaat yang terlaksana sesuai kehendak awal (efektif).³¹ Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif, perlu diperhatikan pula ketepatan di dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

Menurut Riant Nugroho, ada lima hal yang perlu dipenuhi dalam hal ketepatan implementasi suatu kebijakan, yakni; ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target kebijakan, ketepatan lingkungan kebijakan, serta ketepatan dalam proses kebijakan.³² Kelimanya harus terpenuhi agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Beberapa tahun terakhir, kebijakan yang mengarah ke desa tergolong ke dalam kebijakan afirmatif, walaupun tentu tidak semuanya sama.³³ Sebagai kebijakan yang berfokus ke wilayah pedesaan, PKTD merupakan salah satu program kebijakan afirmatif dengan target sasaran yang jelas. Kebijakan ini dilakukan agar kelompok/ golongan tertentu memperoleh kesempatan yang setara, sehingga tercapai suatu kesetaraan sosial di masyarakat. Kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.³⁴ Karakteristik dan

³¹ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, Second Edition, (Chicago-Illionis: The Dorsey Press, 1986), 12.

³² Riant Nugroho, *Public Policy*, 761-763.

³³ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, 17.

³⁴ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 36.

kriteria target sasaran harus dijelaskan secara detail agar tidak terjadi disinformasi dan menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat. Faktor komunikasi sangat mempengaruhi penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi efektifitas di dalam implementasi sebuah kebijakan.

Namun dalam implementasinya, program tersebut ditujukan kepada semua warga desa setempat tanpa terkecuali, sehingga terkesan sebagai sebuah program pemberdayaan dan meninggalkan nilai-nilai afirmatif yang pada awalnya didesain sebagai empat kriteria sasaran utama. Dengan tidak diakomodirnya para target sasaran tersebut, kebijakan ini terlihat mengalami pergeseran makna, dari kebijakan afirmatif menjadi sebuah program pemberdayaan (*empowerment*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti objek secara alamiah dan menggunakan rujukan utama yang berasal dari informan.³⁵ Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³⁶ Peneliti berusaha untuk memahami proses implementasi padat karya tunai dan mendeskripsikan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfa Beta, 2015), 15.

³⁶ John W. Cresswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi ke-3, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4.

dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang ada.³⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*³⁸ di desa-desa dengan status desa tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kemendesa di tahun 2019. Dari total 27 desa tertinggal di Kabupaten Purworejo, peneliti mengambil tiga desa dengan luas wilayah, kepadatan penduduk, serta alokasi Dana Desa yang mempunyai kemiripan, sehingga data yang diperoleh relevan. Terdapat 21 informan di dalam penelitian ini yang dijelaskan di dalam subjek penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena Purworejo merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Jawa.³⁹ Ketiga desa tersebut masing-masing berada di wilayah pegunungan, pesisir, serta dataran rendah, sehingga dapat menggambarkan proses implementasi serta imbas yang terjadi di desa-desa secara komprehensif. Waktu penelitian dilakukan dari bulan September hingga November 2019. Waktu ini dipilih karena merupakan musim kemarau dimana kegiatan pembangunan desa gencar dilaksanakan.

4. Subjek dan objek penelitian

³⁷ Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 89.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, 121.

³⁹ Kabupaten Purworejo memiliki 469 dan menjadi kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Jawa. Namun di luar Jawa terdapat beberapa Kabupaten yang memiliki jumlah desa di atasnya seperti; Kabupaten Aceh Utara (852 desa), Pidie (730 desa), Bireun (609 desa), Aceh Besar (604 desa), serta Aceh Timur (513 desa) yang berada di provinsi Aceh.

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian atau yang disebut dengan *key person* yang berarti sumber informasi.⁴⁰ Informan dalam penelitian ini adalah para aktor yang terlibat langsung di dalam implementasi PKTD baik di tingkat kabupaten, kecamatan, serta desa. Pada level desa, para informan terdiri dari aktor yang bertanggungjawab dan terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan desa. Peneliti juga mewawancarai 2 orang pekerja yang terlibat di dalam kegiatan PKTD di setiap desa. Jumlah ini dianggap cukup untuk menggambarkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

Tabel 1.1 Daftar Informan

Kabupaten	Jumlah	Kecamatan	Jumlah	Desa	Jumlah
Dinpermades	1	Pendamping Desa/ Pendamping Lokal	3	Sekdes	3
				TPK/TTK	3
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	2	Desa		BPD	3
				Pekerja PKTD	6

Sumber: Hasil Penelitian

Menurut Arikunto, objek penelitian adalah variabel yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian.⁴¹ Sedangkan variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴² Adapun objek dalam penelitian ini adalah program PKTD yang berasal dari anggaran DD di Kabupaten Purworejo.

5. Jenis sumber data

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 12.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 15.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 1998), 58.

Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai bahan masukan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan dapat memberikan informasi atas data yang dibutuhkan.⁴³ Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang berupa arsip, dokumen, foto-foto, sumber tertulis, atau literatur, dan sebagainya.⁴⁴ Data sekunder berasal dari data teknis yang berkaitan dengan program PKTD baik dari undang-undang, laporan, serta peraturan di tingkat kementerian, kabupaten, dan desa, termasuk foto pelaksanaan kegiatan PKTD di lokasi penelitian.

6. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian agar dapat diamati oleh peneliti.⁴⁵ Observasi dapat juga diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki secara luas dan mendalam.⁴⁶ Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, 187.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 203.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, 197.

penelitian dan melihat implementasi kegiatan PKTD dari tahap persiapan, implementasi, serta pelaporan kegiatan oleh desa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau informan dan dilakukan dengan merekam jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka.⁴⁷ Pedoman wawancara dirancang sebagai *guidline* pada saat melakukan wawancara, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data dari data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk.⁴⁸ Data dokumentasi ini cenderung bersifat sekunder. Adapun bentuk dokumentasi yang dilakukan melalui arsip data dari tingkat desa hingga kabupaten, termasuk berbagai berita dan laporan pemerintah mengenai PKTD, dengan didukung oleh foto pelaksanaan PKTD di setiap desa.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 320.

⁴⁸ *Ibid.*, 89.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi atau dokumentasi dengan cara mengorganisir ke dalam kategori dan menyusun dalam bentuk pola, lalu memilah hal yang dianggap penting untuk dibuat sebuah kesimpulan agar mudah dipahami.⁴⁹ Analisis data dilakukan secara induktif berdasar data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi sebuah hipotesa untuk dibuat sebuah kesimpulan. Ada tiga hal yang dilakukan dalam menganalisis data ini:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi berarti merangkum dan memilah hal yang dianggap penting. Peneliti mengumpulkan data lapangan yang cukup kompleks, kemudian memfokuskan pada temuan penelitian dengan mengacu pada pedoman yang telah dibuat, sehingga data yang dihasilkan dapat mendeskripsikan temuan secara spesifik.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data untuk lebih memahami keadaan yang terjadi. Dalam penelitian ini, *display* data dilakukan secara deskriptif bagaimana proses implementasi PKTD di Kabupaten Purworejo terjadi, dengan berbagai tabel, grafik, serta gambar sebagai bahan penunjang, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, 333.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang bersifat sementara dapat berubah apabila tidak didukung oleh data dan bukti yang kuat. Namun apabila didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Penarikan kesimpulan didapat dari beberapa point penting dari hasil penelitian secara menyeluruh, kemudian dirangkum secara lebih komprehensif agar memperoleh intisari penelitian secara ringkas.

8. Uji Keabsahan / Validitas Data

Validitas data merupakan konsep yang sangat penting untuk menentukan keabsahan data. Peneliti menggunakan metode triangulasi data untuk menghindari subjektivitas penelitian. Metode triangulasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan tiga alat pembanding baik berupa sumber, metode, dan teori.

Triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵¹ Teknik ini dipilih agar mendapatkan informasi yang lebih akurat, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendetail. Triangulasi metode yaitu mendapatkan data yang sama dengan metode yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan melalui cek dan re-cek, baik melalui wawancara, dokumen, atau dari bukti-bukti lain yang

⁵⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 287.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 274.

valid. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu agar dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif.⁵² Dalam hal ini, peneliti membandingkan beberapa teori yang sudah ada sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, serta metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Bab II menguraikan latar belakang, alur perumusan, serta acuan PKTD dimulai dari esensi UU Desa, konsep dan formulasi dana desa, sejarah *cash for work*, hingga mekanisme pelaksanaan PKTD secara rinci.

Bab III menjelaskan gambaran umum masyarakat di Kabupaten Purworejo, profil lokasi desa penelitian, kebijakan DD di Kabupaten Purworejo, serta gambaran PKT di Kabupaten Purworejo.

Bab IV membahas tentang implementasi PKT di Kabupaten Purworejo. Ada dua hal yang dibahas dalam bab ini, yaitu tentang kebijakan padat karya tunai desa di Kabupaten Purworejo serta bagaimana efektifitas kebijakan tersebut terjadi. Bab ini juga akan menganalisis faktor yang memengaruhi pelaksanaan PKT di Kabupaten Purworejo berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2007), 372.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan selama penelitian, termasuk memberikan beberapa saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak lain yang relevan.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Cash for work merupakan kebijakan pemerintah yang cukup relevan dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun kebijakan yang diimplementasikan melalui Dana Desa ini belum berjalan secara efektif. Acuan serta prinsip pelaksanaan kegiatan yang disusun belum terimplementasi dengan baik, bahkan cenderung tumpang tindih antar regulasi yang ada. Beberapa indikasinya antara lain; (a) rendahnya inklusifitas masyarakat marginal, (b) partisipasi perempuan masih minim, (c) dominasi elit desa dalam penentuan upah pekerja yang berimbas pada minimnya transparansi kegiatan.

(d) Efektivitas program belum terlihat maksimal. Anjuran refocusing kegiatan tidak dapat terealisasi dikarenakan jenis kegiatan masih dimaknai lintas sektor secara bias, bahkan kewajiban memenuhi 30 persen HOK tidak disertai sanksi tegas. Selama dua tahun berjalan, jumlah desa yang dapat mencapai target di bawah 10 persen. Meskipun tradisi pemberian konsumsi secara swadaya masih berjalan, modal sosial utama, yaitu swadaya tenaga semakin lama semakin tergerus. (e) swadaya dan swakelola yang masih rendah. Meskipun masyarakat setempat aktif terlibat secara swakelola, namun keinginan pengelolaan bahan baku secara mandiri agar perputaran ekonomi berada di desa belum terjangkau, sehingga uang kembali berputar ke luar desa.

PKTD sudah melibatkan masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa, namun tidak menysasar target secara tepat seperti harapan

pembuat kebijakan di awal. Desa hanya mengakomodir masyarakat di sekitar lokasi pembangunan meskipun terdapat warga miskin di lokasi lain di desa tersebut. Kriteria target sasaran yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat seakan diabaikan, karena hanya berdasarkan lokasi wilayah tanpa memperhatikan status ekonomi warga. Data warga stunting belum tersedia baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Pembayaran upah pekerja masih tergantung pada standar upah di setiap desa.

B. Saran

Pemerintah perlu mengkaji ulang berbagai regulasi terkait teknis implementasi PKTD. Kebijakan yang berimbas langsung terhadap masyarakat miskin perlu diintensifkan melalui berbagai program seperti pelibatan masyarakat marginal, maksimalisasi pemberdayaan perempuan desa, dan transparansi keuangan desa demi mendorong tercapainya prinsip yang diharapkan.

Kewajiban pengalokasian upah minimal sebesar 30 persen perlu dikurangi, bahkan dihilangkan agar tidak membebani anggaran keuangan desa. Perhatian terhadap toko material di setiap desa perlu ditingkatkan demi meningkatkan perputaran keuangan di setiap desa. Perlu ketegasan regulasi agar implementasi kebijakan afirmatif tersebut tidak sekedar berimbas pada masyarakat miskin, tetapi lebih spesifik kepada target sasaran awal, sehingga tujuan program dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- BPS, *Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2019*. Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Creswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dirjen PMD Kemendesa. *Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai*. Jakarta, Dirjen PMD Kemendesa PDTT, 2018.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge, 2017.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Edwards III. *Public Policy Implementation*. London: Jai Press Inc, 1984.
- Eko, Sutoro. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton: Princeton University Press, 2017.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Hayat(ed). *Formasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Julia, Sopha. *Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Pesanggrahan Kotamadia Jakarta Selatan*. Jakarta: Fisip UI, 2010.
- Kementerian Keuangan. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2019.
- Korten, David C, and C Syahrir. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Kusumanegara, Salahuddin. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Lexy, J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Mubyarto. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM, 1984.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Prawirosentono, Suryadi. *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), 1999.
- Pulzl, Helga, and Oliver Treib, "Implementasi Kebijakan Publik.", Imam Baihaqi(ed). *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, Dan Metode*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Quade, Edward S, and Grace M Carter. *Analysis for Public Decisions*. New York: MIT Press Cambridge, 1989.
- Ripley, Randall B, and Grace A Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago-Illionis: The Dorsey Press, 1986.
- Sheppard, Michael. *Social Work and Social Exclusion: The Idea of Practice*. Burlington: Ashgate Publishing, Ltd, 2012.

Silahuddin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Sivakumar, S.S. *Guidelines for Implementation of Cash For Work- A Post Conflict Recovery Process*. Mannar: Emergency Northern Recovery Project (ENReP), 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 1998.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

_____. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.

Tatang, M Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

Jurnal, Artikel

Andrews, Colin, Prospere Backiny-yetna, Emily Garin, Emily Weedon, Quentin Wodon, and Giuseppe Zampaglione. "Liberia's Cash For Work: Temporary Employment Project Responding to Crisis in Low Income, Fragile Countries." *Social Protection & Labor*, 1114, 2011.

Dian, Tiara Rama. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Publika*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2019.

Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. "Laporan Akhir Evaluasi PNPM Mandiri." Jakarta: Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2013.

Dony. "Pengawasan Agar Tepat Sasaran." *Warta Pengawasan*, Vol. XXV No. 1 Tahun 2018.

Doocy, Shannon, Michael Gabriel, Sean Collins, Courtland Robinson, and Peter Stevenson. "Implementing Cash for Work Programmes in Post-Tsunami Aceh: Experiences and Lessons Learned." *Disasters*, 30.3 (2006).

FAO. "Building Resilience for Food Security and Nutrition (FSN)." <http://www.fao.org/3/I9384EN/i9384en.pdf>.

- Herdiyana, D. "Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung dan Riau." *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2019.
- Mangkuprawira, Sjafri. "Mengapa Program Padat Karya Diperlukan." *Majalah Agrimedia*, Vol. 4 No. 1 (Februari 1998).
- Missaglia, Marco, and Paul De Boer. "Food-for-Work Versus Cash-for-Work: Emergency Assistance in Palestine." *Economic Systems Research*, 16.4 (2004).
- Rahaju, Tjitjik. "Implementasi Program Padat Karya: Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur." *Jurnal Demokrasi*, Vol.6 No.1 Tahun 2007.
- Ruhmaniyati. "Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa." *Catatan Kebijakan Smeru Seri UU Desa*, No. 5/Okt/2018.
- Sabatier, Paul A. "Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis." *Journal of Public Policy*, 6.1 (1986).
- Sumodiningrat, Gunawan. "Program Inpres Desa Tertinggal: Kebijaksanaan Dan Arah Baru Penanggulangan Kemiskina." Dipresentasikan pada *Penataran warga KBG-B Unit Kantor Menteri Negara PPN/ Bappenas* di Jakarta tanggal 6-7 Desember 1995.

Peraturan

- Peraturan Bupati Purworejo No. 35 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Yang Bersumber Dari APBDes.
- Peraturan Bupati Purworejo No. 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- Peraturan Bupati Purworejo No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2016 -2021.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Surat Kabar, Website

PPMD. Kemendesa. *Penyaluran Dana Desa Tahun 2015 – 2019*. <https://sipede.ppmmd.kemendesa.go.id/>. Diakses tanggal 1 Februari 2020.

Kemendesa PDPT “Dana Desa Untuk Padat Karya, Tidak Boleh Dipihak Ketigakan”. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3117/dana-desa-untuk-padat-karya-tidak-boleh-dipihak-ketigakan>. Diakses Tanggal 12 Februari 2020.

Isna Irawan, Karina. “Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Diubah” <https://bebas.kompas.id/baca/ekonomi/2020/01/15/pengalokasian-dan-penyaluran-dana-desa-tahun-2020-diubah/>. Diakses pada 1 Februari 2020.

Tirto.id. “Padat Karya Tunai, Program Gaya Lama Jelang Pemilu.” <https://tirto.id/padat-karya-tunai-program-gaya-lama-jelang-pemilu-cE5Z>. Diakses Tanggal 1 januari 2020.

bps.go.id

idm.kemendesa.go.id.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA